KEMENTERIAN KEUANGAN RI						
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						

YWOWWZ2K

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 I	A.1 NPWP : 68 807 593 6 722 000								
A.2 NIK : The state of the stat									
A.3 Nama : NS RAHMAWATI									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PA		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
	2 21-402-01			2.920.000	2.920.000	0	15	438.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 0002/H.PENGELOLA/RSJD_AHM/2022									
Nama Dokum			ımen	en Bukti Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor: Tanggal								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2 Nama Instansi Pemerintah :				RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4	4 Tanggal : 0		0 1	dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5			Y						
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.					
				Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.					